

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam evaluasi kebijakan bus trans jogja, penulis mengkategorikan dalam beberapa penilaian yaitu :

1. Efektivitas

Bila dilihat dari segi efektifitas, maka sebenarnya lahirnya Trans Jogja tidak sepenuhnya efektif karena seperti kita ketahui, kendaraan pribadi khususnya motor merupakan transportasi yang sangat dominan di Jogja ini. Sekaligus, menjadi faktor utama penyebab kemacetan. Artinya, tanpa perpindahan moda transportasi dari motor/mobil ke Trans Jogja maka kemacetan tetap akan sulit direduksi.

2. Efisiensi

Bila dilihat dari segi efisiensi maka kebijakan Trans Jogja ini kurang berhasil karena pertumbuhan lalu lintas semakin tinggi sedangkan pertumbuhan jaringan jalan rendah. Permasalahan ini terjadi karena tidak adanya jalur khusus untuk Trans Jogja dan ruas jalan yang ada di Yogyakarta ini tidak memadai.

3. Kecukupan

Bila dilihat dari segi kecukupan, maka kebijakan yang di buat oleh

menunjukkan kebanyakan peminat Trans Jogja adalah para wisatawan yang mempunyai banyak waktu tunggu apabila terjadi kemacetan di jalan.

4. Perataan

Dari data anggaran yang ada, untuk pelaksanaan Peroperasian Bus Trans Jogja tidak sepenuhnya cukup dan belum sesuai dengan manfaat dan tujuan yang diharapkan karena masih adanya keluhan dari masyarakat tentang kemacetan yang semakin parah dan polusi udara yang semakin meningkat.

Transportasi telah mencemari udara yang mengakibatkan masalah kesehatan. Kemacetan lalu lintas sebagai dampak dari peningkatan pemakaian kendaraan pribadi, telah mengakibatkan menurunnya produktivitas, pemborosan BBM dan semakin buruknya kualitas lingkungan.

5. Responsivitas

Sebagai suatu kebijakan baru yang cukup inovatif, maka kebijakan penyediaan transportasi publik berupa Trans-Jogja perlu dilakukan evaluasi secara rutin dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik dibidang penyediaan angkutan publik.

6. Ketetapan

Bila dilihat dari segi ketetapan maka kebijakan ini tidak sepenuhnya berhasil karena tujuan dari adanya Trans Jogja untuk

mengurangi angka ketergantungan pemakaian kendaraan pribadi tidak sepenuhnya tercapai.

Dilihat dari semua kategori evaluasi maka dapat dikatakan bahwa kebijakan Trans Jogja ini gagal dan tidak mencapai target yang dibuat pemerintah sebelum diterapkannya kebijakan ini, karena semua aspek menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak berhasil atau kurang berhasil.

Faktor Pendukung Kebijakan Trans Jogja : dirasa lebih nyaman dengan berbagai fasilitas seperti AC, bebas pengamen, bebas pengasong, terib (karena hanya menaikkan penumpang ditempat yang telah disediakan), dan jaminan tepat waktu. Faktor penghambat kebijakan Trans Jogja seperti : Pemilik kendaraan tetap menggunakan kendaraan pribadinya yang sudah terlanjur dimiliki, karena dinilai juga lebih cepat, hemat, dan mudah.

B. SARAN

Melihat kenyataan yang seperti ini, sebaiknya pemerintah bertindak lebih bijaksana dalam perkembangan dan pengembangan bidang lalu lintas di DIY. Baik itu pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten, karena tingkat kemacetan di kota ini sudah semakin mengkhawatirkan.

Pemerintah sebaiknya menetapkan secara jelas perihal apa yang harus dilakukan. Apakah tindakan tersebut berupa pelebaran jalan maupun penambahan jumlah armada Trans Jogja. Karena dengan penambahan transportasi umum, diharapkan DIY dapat menjadi kota yang bebas macet.

dan mahasiswa di DIY. Di samping itu juga perlu adanya pengawasan yang ketat dan juga sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran agar pada akhirnya sebuah peraturan tidak berakhir hanya pada sebuah peraturan yang dibuat tanpa adanya pengawasan pada